

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh negara pasti ingin mencapai tujuan dalam kesejahteraan perekonomian yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Tidak terlepas, Negara Indonesia memiliki tujuan yang sistematis dengan ditujukan untuk kesejahteraan, perdamaian, dan ketertiban kepada rakyat secara menyeluruh dan merata sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.¹ Dalam mencapai tujuannya, Negara Indonesia mempunyai suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas 2025-2045 yakni mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.²

Indonesia sendiri terbagi menjadi 38 Provinsi yang saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahannya adalah presidensial dengan menganut prinsip-prinsip demokrasi, sehingga presiden memegang kekuasaan suatu kewenangan khusus maupun umum pada suatu pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Terkait pengelolaan keuangan negara, masyarakat berharap dalam menjalankannya dengan terbuka, tanggung jawab dan bebas dari penyalahgunaan

¹ Sri Pujiati, "Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945", dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>, diakses 4 Desember 2023

² Tanpa Penulis, "Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, dalam <https://indonesia2045.go.id/>, diakses 4 Desember 2023

maupun penyelewengan dengan selalu mengikuti ketentuan pada peraturan perundang-undangan.³ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 1 dengan intinya menjelaskan bahwa keseluruhan atas hak maupun kewajiban sebuah negara yang bisa dinilai oleh uang, serta atas segala hal mencakup uang maupun barang yang dapat dikatakan milik negara berhubungan dengan suatu pelaksanaan tentang kewajiban serta hak merupakan makna perihal suatu keuangan negara.⁴

Keuangan negara dapat diwujudkan dengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pihak dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan pengaturan terkait kewajiban maupun hak dari pihak pemerintah dilakukan dengan transparan, selaras undang-undang, akuntabel, dan adil.⁶ Pemerintahan pusat ialah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah terkait keuangan yakni dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

³ BPK RI Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, “Pengelolaan Keuangan Negara Harus Transparan dan Akuntabel”, dalam <https://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabel>, diakses 4 Desember 2023

⁴ Paulina, Y. Amtiran, Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara”, dalam *Journal Of Management (Sme's)* Vol. 12, No.2, 2020, hal. 206

⁵ Anggit, Sulistiawan, Budi Ispriyarso, Aprista Ristyawati, “Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, hal. 147

⁶ Admin, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah”, dalam <https://bpkpad.purworejokab.go.id/2022/01/27/>, diakses 4 Desember 2023

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dimulai dengan mempunyai suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup waktu 20 Tahun. Penyusunan dilanjutkan dengan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode 5 Tahun. Kemudian, penyusunan atas suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam jangkauan waktu 1 Tahun. Setelah itu, terbentuk Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kepala daerah menerbitkan atas suatu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian, penetapan atas peraturan daerah perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁷

APBD menurut UU pasal I ayat 8 memiliki arti persetujuan dari DPRD atas suatu rencana perihal keuangan dalam tahunan pada suatu daerah.⁸ Berdasarkan dari Kementerian Keuangan perihal makna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah penetapan dari kepala daerah terkait suatu perencanaan selama satu tahun atas keuangan pemerintah daerah atas hasil dari koordinasi antara DPRD, pihak legislatif, serta kepala daerah.⁹ Dari uraian tersebut, pemaparan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu suatu rencana keuangan daerah dengan kurun waktu 1 tahun guna menjadi sarana komunikasi

⁷ Humas DJPK, “Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah”, dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>, diakses 5 Desember 2023

⁸ Simson Werimon, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) (*Study* Empiris Di Provinsi Papua)”, Dalam Tesis, hal. 13

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>, diakses 13 September 2023

antara pemerintahan daerah dengan masyarakat untuk mengarahkan kepada suatu tujuan bersama yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan dari DPRD.

Suatu APBD dapat dikelola cermat dengan menerapkan secara tepat dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mempermudah terwujudnya tujuan dan manfaat terkait perekonomian suatu daerah sesuai harapan. Otonomi daerah merupakan suatu pelimpahan atau pengalihan atas wewenang atau kekuasaan dari perencanaan pemerintahan pusat yang diberikan kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus berprinsip pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah, harus nyata dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya, selaras dengan konstitusi negara, mengembangkan peran masyarakat, peran dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰

Otonomi daerah dipraktekkan dengan sistem *good government*, yang mana memiliki arti suatu sistem dimana adanya keselarasan dalam keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat agar tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas penyelenggaraan pemerintah daerah dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang. Asas-asas yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 58 meliputi: Akuntabilitas, keadilan, keterbukaan, kepentingan umum, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, proporsionalitas, tertib penyelenggaraan negara.¹¹

¹⁰ Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia", dalam Jurnal Ilmiah Pemerintah Moderat Vol 2 No 2 Mei 2016, hal. 802-803

¹¹ Achmad, Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan

Dampak keberlanjutan dari adanya Covid-19 masih dapat dirasakan oleh negara di seluruh dunia dalam segala aspek. Tidak terlepas, Negara Indonesia yang salah satu aspek paling besar dirasakan oleh semua kalangan yakni aspek perekonomian. Hal tersebut, dibuktikan dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) terkait pertumbuhan perekonomian Indonesia Tahun 2017-2022.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: BPS, BI– Litbang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data pertumbuhan perekonomian Indonesia Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam persentase yang tertinggi pertahunnya terjadi di periode 2018 yakni sebesar 5,17%, dan paling rendah di periode 2020 dengan persentase -2,07%. Pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia mencapai pada Tingkat 5,07% dan mengalami kenaikan 0,10%

menjadi 5,17%. Pada Tahun 2018 ke Tahun 2019 menurun sebesar 0,15% dan persentase menjadi 5,02%.

Tahun 2019 terjadi wabah Covid-19 dan dampaknya berlanjut sampai tahun selanjutnya, hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 yakni mengalami penurunan sebesar -7,09% menjadi -2,07%. Kemudian, Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik sekisar 1,93% dan jumlahnya menjadi 4,0%. Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 5,5% atau dapat dikatakan tumbuh sebanyak 1,50% dari tahun sebelumnya.¹²

Ketika Negara Indonesia harus berupaya memulihkan keadaan ekonomi dari akibat adanya Covid-19. Indonesia juga harus menghadapi kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia secara merata. Menurut data statistik KPK, rekapitulasi tindak pidana korupsi terbesar Tahun 2022 di Indonesia teratas berasal dari Pemerintah Pusat dan urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur.¹³

Akibat korupsi dapat dirasakan oleh individu itu sendiri, orang lain, keluarga, bahkan merugikan negara dikarenakan beberapa pelaku adalah orang yang bekerja di tempat tersebut dan mengetahui banyak tentang data yang dapat dimanipulasi dengan mudah karena kekuatan kekuasaan atau perlindungan dan

¹² Selocahyo, Basoeki, Utomo S, "Proyeksi 2022

BI Perkiraan Ekonomi pada 2022 Tumbuh 4,7-5,5 Persen", dalam [tps://koran-jakarta.com/bi-perkiraan-ekonomi-pada-2022-tumbuh-4-7-5-5-persen?page=all](https://koran-jakarta.com/bi-perkiraan-ekonomi-pada-2022-tumbuh-4-7-5-5-persen?page=all), diakses 6 Desember 2023

¹³ Adel, Andila Putri, "Provinsi Dengan Tindak Pidana Korupsi Terbesar di Indonesia", dalam <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tindak-pidana-korupsi-terbesar-di-indonesia-y8usf>, diakses 07 Mei 2024

dukungan dari pihak yang sangat berpengaruh kuat posisi atau jabatannya.¹⁴ Tindakan korupsi tersebut, bagi setiap daerah jelas merugikan warganya dan memberi dampak besar terhadap dana anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi wilayah pemerintahan yang dipimpin.

Oleh karena itu, pada lembaga pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dengan suatu pengukuran kinerja atas pengelolaan keuangan APBD. Pengukuran kinerja memiliki arti suatu tahap atau langkah yang ditempuh dalam suatu pelaporan sebagai monitoring guna mengevaluasi sebuah hasil yang akurat terkait sistem pengendalian manajemen dalam periode tertentu. Baik yang bersifat positif atau sebaliknya, serta memiliki tujuan untuk menilai suatu keberhasilan dari seorang pemimpin dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Tabel 1.1
Data Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022

No.	Nama Daerah	Pendapatan Daerah (M)	Belanja Daerah (M)
1.	Pacitan	Rp.1.638,57	Rp.1.654,07
2.	Ponorogo	Rp.2.298,91	Rp.2.518,77
3.	Trenggalek	Rp.1.855, 15	Rp.2.095,65
4.	Tulungagung	Rp.2.508,71	Rp.2.666,84
5.	Blitar	Rp.2.322,45	Rp.2.391,91
6.	Kediri	Rp.2.774,77	Rp.3.189,86

¹⁴ Mudemar, A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", dalam Jurnal Mitra Manajemen Vol 6, No. 2, hal. 37-38

¹⁵ Leli, Ekasari, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016, dalam Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, hal. 5

7.	Malang	Rp.4.196,21	Rp.4.525,33
8.	Lumajang	Rp.2.109,08	Rp.2.246,29
9.	Jember	Rp.3.811,39	Rp.4.397,87
10.	Banyuwangi	Rp.2.989,97	Rp.3.005,97
11.	Bondowoso	Rp.1.926,46	Rp.1.972,49
12.	Situbondo	Rp.1.727,32	Rp.2.082,99
13.	Probolinggo	Rp.2.327,96	Rp.2.454,51
14.	Pasuruan	Rp.3.304,78	Rp.3.558,63
15.	Sidoarjo	Rp.4.500,31	Rp.5.446,31
16.	Mojokerto	Rp.2.350,99	Rp.2.449, 76
17.	Jombang	Rp.2.575,24	Rp.2.722,75
18.	Nganjuk	Rp.2.174,44	Rp.2.430,99
19.	Madiun	Rp.1.887,05	Rp.1.965,32
20.	Magetan	Rp.1.758,40	Rp.1.840,28
21.	Ngawi	Rp.2.122,60	Rp.2.287,32
22.	Bojonegoro	Rp.4.148,11	Rp.5.947,60
23.	Tuban	Rp.2.480,88	Rp.2.634,05
24.	Lamongan	Rp.2.977,27	Rp.3.118,18
25.	Gresik	Rp.3.439,39	Rp.3.682,75
26.	Bangkalan	Rp.2.277,20	Rp.2.454,75
27.	Sampang	Rp.1.819,41	Rp.2.071,54
28.	Pamekasan	Rp.1.908,21	Rp.2.305,57
29.	Sumenep	Rp.2.349,23	Rp.2.644,25
30.	Kota Kediri	Rp.1.236,95	Rp.1.525,93
31.	Kota Blitar	Rp.877,51	Rp.1.002,31
32.	Kota Malang	Rp.2.076,98	Rp.2.219,29
33.	Kota Probolinggo	Rp.945,77	Rp.1.112,77
34.	Kota Pasuruan	Rp.831,90	Rp.1.056,74
35.	Kota Mojokerto	Rp.805,27	Rp.1.096,78
36.	Kota Madiun	Rp.983,49	Rp.1.158,49

37.	Kota Surabaya	Rp.9.533,44	Rp.10.395,19
38.	Kota Batu	Rp.920,58	Rp.1.116,16

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Berdasarkan tabel 1.1, menurut Kementerian Keuangan data jumlah APBD periode 2022 pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah yang berbeda. Menurut data diatas menjelaskan bahwa dana belanja daerah lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan daerah pada setiap wilayah, untuk daerah dengan APBD paling tinggi yaitu wilayah Kota Surabaya. Kota Mojokerto adalah wilayah paling rendah terkait nilai terkait APBD. Kota Surabaya menunjukkan pendapatan daerahnya sebesar Rp. 9.533,44 Miliar dan dana belanja daerah bernilai Rp.10.395,19 Miliar. Kota Mojokerto anggaran pendapatan berjumlah Rp.805,27 Miliar dan dana belanja daerahnya sebesar Rp.1.096,78 Miliar.¹⁶

Pengukuran kinerja menurut teori Kawatu, dan didukung oleh teori lainnya dari; Mahmudi¹⁷, Halim dan Kusufi¹⁸, Hanafi dan Mugroho¹⁹, dan Halim²⁰. Pernyataan bahwa pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan salah satunya dengan cara analisis pendapatan dan analisis belanja. Dimana, analisis pendapatan

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Data Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur", dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, diakses 7 September 2023

¹⁷ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2010), hal. 136

¹⁸ Abdul, Halim., & Muhammad, Syam *Kusufi, Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

¹⁹ Imam Hanafi, Tri Laksono Mugroho, *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia* (Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2009)

²⁰ Abdul, Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

meliputi; Analisis varians anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio keuangan mencakup; Rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio utang terhadap pendapatan, dan (*Debt Service Coverage Ratio*) dan analisis belanja mencakup; Analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio belanja terhadap PDRB.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Ningtias dkk atas Judul “*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016*”. Penelitian tersebut, menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menunjukkan hasil berdasarkan tingkat kemandirian konsultatif. Menurut derajat desentralisasi fiskal masih kurang. Pengukuran menggunakan *growth* tinggi pada wilayah pada Provinsi Jawa Timur.²¹

Berdasarkan pada teori dan salah satu penelitian terdahulu, penulis memilih tema tugas akhir adalah analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur dikarenakan untuk mengembangkan hasil dari penetian terdahulu melalui penggunaan variabel, jumlah sampel daerah, serta tahun yang berbeda. Kemudian, untuk alasan memilih lokasi Provinsi Jawa Timur karena provinsi tersebut pada Tahun 2022 menjadi tempat urutan nomor

²¹ Yeni, Dwi Ningtias, Tatas Ridho Nugroho, dan Nur Ainiyah, “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016”, dalam Jurnal (*Online*), hal. 1- 10

dua untuk rekapitulasi tindak pidana korupsi terbesar setelah dari pemerintah pusat di Indonesia.

Data anggaran pendapatan maupun belanja di setiap daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur pasti berbeda, sehingga setiap hasil pengukuran yang dilakukan oleh penulis juga akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Terkait penjabaran dari fenomena yang ada, penulis memilih judul penelitian tugas akhir yakni “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Pembahasan permasalahan yang diidentifikasi digunakan guna mengetahui kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi, analisis varians belanja, dan rasio efisiensi belanja. Peneliti hanya berfokus dalam pengelolaan keuangan dengan periode dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 agar pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hasil yang akurat dan terpercaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu kalimat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mencakup apa, bagaimana, dan mengapa terkait tema pembahasan yang diusung peneliti. Permasalahan-permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah terkait tema tentang pengukuran kinerja keuangan diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengukuran berdasarkan analisis varians pendapatan pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
2. Bagaimana pengukuran berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
3. Bagaimana pengukuran berdasarkan rasio kemandirian pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
4. Bagaimana pengukuran berdasarkan rasio ketergantungan pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
5. Bagaimana pengukuran berdasarkan derajat desentralisasi pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
6. Bagaimana pengukuran berdasarkan analisis varians belanja pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?
7. Bagaimana pengukuran berdasarkan rasio efisiensi belanja pada kinerja keuangan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022?

D. Tujuan Masalah

Tujuan masalah adalah suatu jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan dan disusun sesuai dengan tema yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Tujuan dan maksud dari peneliti mengambil tema pengukuran kinerja keuangan ialah:

1. Untuk menganalisa varians pendapatan pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisa pertumbuhan pendapatan pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
3. Untuk menganalisa rasio kemandirian pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
4. Untuk menganalisa rasio ketergantungan pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
5. Untuk menganalisa derajat desentralisasi pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
6. Untuk menganalisa varians belanja pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.
7. Untuk menganalisa rasio efisiensi belanja pada kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dijadikan tambahan ilmu dan sebagai bentuk dari pengembangan ilmu terkait teori penelitian tentang metode dan cara penilaian kinerja keuangan atas suatu pengelolaan APBD khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian yang dibuat diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan serta berupaya meningkatkan efisiensi dari anggaran belanja agar mempermudah adanya monitoring, evaluasi, serta perencanaan yang bersifat jangka panjang.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian yang dibuat diharapkan dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, serta dapat menambah wawasan terkait bacaan ilmiah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dibuat diharapkan dapat digunakan untuk sumber rujukan atau bahan referensi dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang, serta dapat menjadi sumbangan pengetahuan terkait tema penelitian, dan bisa dipraktikkan maupun dikembangkan melalui variabel yang belum digunakan oleh penulis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan, peneliti membatasi dengan ruang lingkup mencakup; Analisis varians pendapatan (X1), analisis pertumbuhan pendapatan (X2), rasio kemandirian (X3), rasio ketergantungan (X4), derajat desentralisasi (X5), analisis varians belanja (X6), rasio efisiensi belanja (X7), disertai data laporan terkait publikasi data APBD pada Tahun 2019-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian terletak pada penggunaan variabel yang hanya mencakup; Analisis varians pendapatan (X1), analisis pertumbuhan pendapatan (X2), rasio kemandirian (X3), rasio ketergantungan (X4), derajat desentralisasi (X5), analisis varians belanja (X6), rasio efisiensi belanja (X7).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Sulisworo didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (output), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (*outcome*).²² Suatu tindakan yang

²² Dwi, Sulisworo, *Pengukuran Kinerja*, (Universitas Ahmad Dahlan: Tanpa Penerbit, 2009), hal. 1

dilakukan pihak manajemen guna mengevaluasi terkait hasil dalam sistem pengendalian manajemen suatu organisasi bisnis yang telah dilaksanakan masing-masing pertanggungjawaban adalah pendapat dari Gorda perihal pengertian pengukuran kinerja.²³

Peneliti mengambil kesimpulan terkait pengertian pengukuran kinerja ialah suatu tahap atau langkah yang ditempuh dalam suatu pelaporan sebagai monitoring bagi perusahaan, lembaga atau organisasi guna mengevaluasi sebuah hasil yang akurat terkait sistem pengendalian manajemen yang dilakukan dalam periode tertentu baik yang bersifat positif atau sebaliknya.

b. Kinerja Keuangan

Sutrisno menjelaskan kinerja keuangan ialah rangkaian aktivitas dari keuangan yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pada suatu periode tertentu yang mencakup laporan laba rugi dan neraca. Pendapat dari Haritjo dan Martono penilaian pada kondisi keuangan yang bertujuan sebagai informasi baik masa lalu, saat ini, maupun masa depan adalah pemaparan tentang kinerja keuangan.²⁴

Callahan menerangkan terkait pengertian kinerja keuangan adalah jika perusahaan telah mencapai prestasi yang dinyatakan dengan nilai uang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.²⁵ Peneliti mengambil kesimpulan sesuai uraian

²³ Ni, Made, Sri Ayuni, A.A.N. Oka Suryadinatha Gorda, *Balanced Scorecard, Solusi Mengukur Kinerja LPD di Kabupaten Buleleng*, (Buleleng: Nilacakra, 2020), hal. 8

²⁴ Muh., Taslim, Dangnga, dan M. Ikhwan Maulana Haeruddin, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*, (Tanpa Keterangan Daerah: CV. Nur Lina, 2018), hal. 61

²⁵ Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan 2020*, (Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama), 2020), hal. 6

diatas, bahwa pengertian kinerja keuangan merupakan aktivitas dari keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dalam batasan waktu yang ditentukan dan tersaji melalui laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada perusahaan baik dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Latif, dkk menjelaskan bahwa seluruh berbagai kegiatan yang mencakup suatu perencanaan, pengeluaran belanja, implementasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap anggaran daerah merupakan penjabaran pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sendiri diantaranya adalah penerimaan daerah, pengeluaran daerah, hak dalam pajak dan retribusi daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah juga mencakup kewajiban melaksanakan tugas pemerintah daerah serta melakukan pembayaran atas suatu tagihan pihak ketiga, surat berharga, barang, piutang, atau hal lain yang dikelola oleh pihak lain maupun sendiri, serta kekayaan khususnya dikuasai pemerintah yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum.²⁶ Kesimpulan atas penjabaran terkait pengelolaan keuangan daerah memiliki makna suatu seluruh kegiatan dalam perusahaan terkait dengan keuangan lingkup daerah dengan mencakup proses atas suatu perencanaan, pengeluaran belanja, implementasi, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara menyeluruh.

²⁶ Arsan, Latif, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Asian Development Bank, 2019), hal. 5

d. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Munawir adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan guna kelancaran mendapatkan informasi akurat terkait keadaan keuangan serta pencapaian perihal kondisi perusahaan bersangkutan dan diharapkan membantu para pengguna membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.²⁷ Informasi akuntansi krusial yang dapat mengendalikan keseluruhan aktivitas perusahaan terkait finansial merupakan pengertian laporan keuangan menurut Sufyati HS dkk.²⁸ Kesimpulan terkait penjabaran laporan keuangan ialah alat penting yang memuat hasil pencatatan keseluruhan suatu laporan terkait informasi akuntansi yang krusial supaya mendapatkan informasi akurat tentang kondisi keuangan.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD menurut Kementerian Keuangan adalah penetapan dari kepala daerah terkait suatu kegiatan khususnya dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun.²⁹ Suatu hal untuk patokan bagi pemerintah daerah melakukan kegiatan yang meliputi pemasukan serta penganggaran daerah adalah pendapat Latif dkk terkait APBD.³⁰ Dari uraian tersebut, kesimpulan APBD adalah suatu perencanaan sebagai patokan pengukuran dalam penganggaran maupun masukan keuangan daerah secara

²⁷ Wastam, Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2018), hal. 2

²⁸ Sufyati, dkk, *Analisis Laporan Keuangan*, (Cirebon: Insania, 2021), hal. 2

²⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>, diakses 13 September 2023

³⁰ Arsan, Latif, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan ...*, hal. 5

keseluruhan berdasarkan periode tertentu yang dijadikan sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

f. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan adalah bagian dari teknik analisis laporan keuangan melalui perhitungan hasil terkait realisasi pendapatan dengan dana pengeluaran.³¹ Analisis varians ini digunakan untuk melakukan perbandingan antara hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi dan tindakan korektif dapat dilakukan.³²

g. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan adalah suatu teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui turun naiknya kinerja dalam batasan waktu tertentu dan bermanfaat mengukur kinerja keuangan mengalami pertumbuhan positif atau sebaliknya yang dilakukan dengan pendapatan tahun lalu dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh tahun dihitung dibagi dengan pendapatan tahun lalu dan dikalikan dengan persentase seratus persen.³³

h. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah suatu teknik pengukuran guna mempermudah penilaian kemandirian dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan

³¹ Freddy, Samuel Kawatu. *Analisis Laporan Keuangan SEKTOR PUBLIK*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 50, 92-93

³² Ria, S, *Akuntansi Manajerial Pengambilan Keputusan Berbasis Data*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hal. 5

³³ Freddy, Samuel Kawatu. *Analisis Laporan ...*, hal. 50-51, 95

publik secara merata atau dapat dikatakan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah.³⁴

i. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu alat pengukuran yang dibutuhkan dalam melakukan analisis pendapatan melalui LRA untuk menilai kinerja dalam rangka suatu penyelenggaraan otonomi daerah melalui perbandingan terkait jumlah pendapatan transfer serta total penerimaan daerah.

j. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah salah satu bagian dari alat pengukuran rasio keuangan lingkup analisis pendapatan untuk mencapai tujuan keberhasilan pemerintah daerah untuk suatu penyelenggaraan sistem desentralisasi melalui PAD serta total pendapatan daerah.

k. Analisis varians Belanja

Analisis varians Belanja adalah alat perhitungan untuk mendapatkan hasil selisih terkait realisasi belanja dengan dana belanja dari masing-masing daerah dalam kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah melalui informasi terkait yang dipublikasikan pemerintah ke bentuk LRA.

l. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja yaitu bagian perhitungan kinerja pada lingkup analisis belanja yang digunakan untuk mengukur keefisiensi dana yang

³⁴ Irma, Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 8

dikeluarkan melalui perhitungan besaran realisasi belanja dan anggaran belanja.³⁵

2. Defisi Operasional

Sesuai dengan penjelasan secara konseptual, penelitian berfokus pada data laporan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022 melalui pengukuran berdasarkan; Analisis varians pendapatan (X1), analisis pertumbuhan pendapatan (X2), rasio kemandirian (X3), rasio ketergantungan (X4), derajat desentralisasi (X5), analisis varians belanja (X6), rasio efisiensi belanja (X7).

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan penelitian untuk memudahkan memahami isi skripsi terkait tema pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD khususnya pada Provinsi Jawa Timur, peneliti menyertakan sistematika pembahasan selaras dengan pedoman skripsi Univeritas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mencakup bagian awal, bagian isi, serta bagian akhir dari suatu penelitian.

Pada bagian awal mencakup halaman daripada judul, lembaran terkait persetujuan dosen, lembaran perihal pengesahan dosen, lembaran penjelasan motto, lembaran persembahan skripsi diperuntukkan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan diakhiri abstrak.

³⁵ Freddy, Samuel Kawatu. *Analisis Laporan Keuangan SEKTOR PUBLIK*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 110, 114

Pada bagian isi dari skripsi terbagi menjadi enam bab, diantaranya ialah:

- BAB I** Pendahuluan, latar belakang dari judul penelitian, identifikasi permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan masalah penelitian, kegunaan dilakukan sebuah penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional, serta sistematika pembahasan dari skripsi.
- BAB II** Landasan teori, berisi tentang pemaparan perihal dasar teori yang digunakan dalam pemecahan permasalahan dari judul penelitian. Terdapat pula penelitian terdahulu yang dijadikan suatu sumber data penelitian, dan gambar mengenai kerangka konseptual.
- BAB III** Metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian terkait pembahasan judul skripsi, penjelasan dari populasi, sampling, dan sampel dari penelitian. Pemaparan sumber data, variabel, dan skala pengukuran, serta penjelasan terkait pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta penjelasan terkait teknik analisis data untuk pemecahan masalah dalam suatu penelitian dalam skripsi.

- BAB IV** Hasil dari penelitian, berisi nilai dari perhitungan analisis pendapatan dan analisis belanja untuk pengukuran kinerja keuangan terkait APBD.
- BAB V** Pembahasan perihal hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan dan diselaraskan teori serta penelitian terdahulu dengan tema yang serupa terkait kinerja pada pengelolaan APBD.
- BAB VI** Penjabaran tentang penutup, berisi kesimpulan yang memuat hasil suatu penelitian terkait tema perihal suatu analisis pengukuran kinerja dalam pengelolaan APBD yang disertai dengan saran.

Bagian akhir terdiri daftar pustaka, lampiran-lampiran penelitian, kartu kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan, dan juga dilengkapi dengan daftar riwayat hidup peneliti.